

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Gajah Mada No.126 Praya Lombok Tengah

TAHUN 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen renstra ini adalah suatu bentuk perwujudan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati terpilih yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran, dan pagu pendanaan indikatif yang disediakan. Oleh karenanya, dokumen renstra ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu yang sama.

Kami menyadari bahwa kajian yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu senantiasa disempurnakan, mengingat sifat dari dinamika trend pariwisata dunia yang cenderung fluktuatif yang mempengaruhi kepariwisataan daerah.

Praya, Januari 2019

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

**H.L. MOH PUTRIA, S.Pd. M.Pd**  
**NIP.1959123119830 1 1057**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1.    LATAR BELAKANG .....	1
I.2.    PROSES PENYUSUNAN RENSTRA.....	2
I.3.    LANDASAN HUKUM .....	4
I.4.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
I.5.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>9</b>
2.1.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD .....	9
2.2.    SUMBER DAYA SKPD .....	16
2.3.    KINERJA PELAYANAN SKPD .....	20
2.4.    TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD .....	38
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV TUJUAN DANA SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>64</b>
4.1.    TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD .....	64
4.2.    STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	65
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016.....
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 2.4	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.....
Tabel 2.5	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 2.6	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-Isu Startegis (Lingkungan Eksternal) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Tengah.....
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....
Tabel 3.8	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....
Tabel 3.9	Nilai Skala Kriteria.....
Tabel 3.10	Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis.....
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.....
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***1.1. Latar Belakang***

#### **Pengertian Renstra**

Rencana Strategis (renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD periode 5 (lima) tahunan merupakan dokumen yang menjadi acuan kerja dalam jangka menengah. Penyusunan renstra SKPD ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional. Sebagai suatu dokumen periode lima tahunan, renstra SKPD memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikasi kegiatan yang disusun secara terprinci. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan renstra SKPD bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan suatu keharusan.

#### **Fungsi Renstra SKPD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, penyusunan renstra dihadapkan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan mewujudkan kepariwisataan Lombok Tengah yang berdaya saing, berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penyusunan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan untuk mengantisipasi kerentanan sektor kepariwisataan terhadap berbagai isu baik pada tataran lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki andil terhadap perkembangan kepariwisataan itu sendiri.

Dokumen renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ini memuat uraian rinci berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam renstra ini disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui proses *focus group disscusion* (FGD). Sedangkan Alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Renstra didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU ini menjadi tolak ukur penilaian tahunan yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam kurun waktu yang sama.

## ***1.2. Proses Penyusunan Renstra***

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD dimulai dari :
  - a. SKPD menerima Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Renstra SKPD beserta Rancangan Awal RPJMD
  - b. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
    - 1) Ketua Tim : Kepala SKPD
    - 2) Sekretaris Tim : Sekretaris
    - 3) Anggota/Kelompok Kerja : Pejabat/Staf yang dipandang cakap dan mampu menyusun Renstra SKPD
  - c. Tim Penyusun membuat agenda kerja Tim Renstra SKPD
  - d. Rencana kegiatan Tim penyusun Renstra SKPD disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari Surat Edaran Bupati, penyusunan Renstra SKPD, verifikasi Renstra SKPD, hingga penetapan.
2. Tim Penyusun Renstra SKPD menyiapkan Rancangan Renstra SKPD, dengan memperhatikan dan mempedomani :
  - 1) Memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD
  - 2) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan periode sebelumnya;
  - 3) Memperhatikan prioritas dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJP Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sesuai dengan tahapan;
  - 4) Mempedomani Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
  - 5) Memperhatikan dan mempertimbangkan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang berkaitan dengan bidang urusan;
  - 6) Melakukan konsultasi kepada Bappeda Kabupaten, SKPD Provinsi terkait dan K/L yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun Renstra SKPD;
  - 7) Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan berlaku;
  - 8) Memperhatikan Pedoman Penyusunan Renstra SKPD.
- e. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang menentukan kualitas dokumen rencana pembanguna daerah yang disusun. Untuk itu, dalam

penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Prop.**

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah periode 2016-2021. Pokok-pokok penting yang tertuang di dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pokok-pokok penting tersebut menyangkut : visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikasi kegiatan.

Beberapa indikator yang tertuang Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti : jumlah wisatawan asing dan domestik, paralel dengan indikator renstra kementerian pariwisata dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan propinsi NTB. Begitu pula dengan fokus dan lokus percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah, di dalam renstra kementerian pariwisata, renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi NTB, dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah periode 2016-2021 terkonsentrasi di kawasan Mandalika dan sekitarnya, pengembangan Rinjani sebagai geopark dunia di desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, dan pengembangan desa-desa wisata.

#### **Keterkaitan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Renja**

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah periode 2016-2021 memuat strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikasi kegiatan yang disusun secara terprinci. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan sasaran pengembangan kepariwisataan dinilai dari perbandingan antara target dan realisasi yang tercantum di dalam indikator kinerja utama. Seiring dengan hal tersebut, penyusunan renja SKPD merujuk pada renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Konsistensi penyusunan renja terhadap kepatuhan pada renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah merupakan syarat mutlak keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah.

### ***1.3. Landasan Hukum***

Dalam menyusun Renstra Tahun 2016 - 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Landasan Idiil  
Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional  
Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
  - a.) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  - b.) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - d.) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - e.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - f.) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - g.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - h.) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



- i.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- j.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- k.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
- l.) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- m.) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- n.) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o.) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
- p.) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- q.) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- r.) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- s.) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- t.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
- v.) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
- w.) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
- x.) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
- y.) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor XX, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor XX);
- z.) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor XX, Tambahan Lembaran Daerah );

#### ***1.4. Maksud dan Tujuan***

##### **1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2016-2020 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih melalui perwujudan kepariwisataan Lombok Tengah yang berdaya saing, berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan berbagai rencana program dan kegiatan yang terarah, tepat sasaran, terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

## 2. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada setiap tahun anggaran;
2. Sebagai alat penyelaras program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan dinas atau satuan kerja yang terkait;
3. Sebagai alat pengendali dan evaluasi program dan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program.

### ***1.5. Sistematika Penulisan***

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, sistematika penulisan Rencana Strategis sebagai berikut

:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
  1. Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi NTB
  2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
  3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Resntra
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah
  - 1. Tujuan
  - 2. Sasaran
- 4.2 Startegis dan Kebijakan
  - 1. Strategi
  - 2. Kebijakan

#### **BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 2 (dua) buah urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah sektor kebudayaan sedangkan urusan pilihan adalah sektor pariwisata. Pembagian urusan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tertanggal 09 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dukung oleh Aparatur dengan kemampuan dan keterampilan yang relatif memadai. Adapun rincian tugas dan Fungsi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut :

##### **1) Kepala Dinas**

###### Tugas Pokok

- Memimpin, Merencanakan, Mengawasi, Mengendalikan dan Menkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

###### Fungsi

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
2. Perumusan kegiatan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku;
3. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Penyelenggara pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Penyelenggara Koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksana tugas Dinas dan satuan kerja Dinas perangkat daerah dan Instansi terkait;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau Swasta;
7. Pemberian Pertimbangan dan Penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

8. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
9. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
10. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) SEKRETARIS DINAS**

### Fungsi

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, , umum dan kepegawaian.

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
4. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
5. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
6. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan /Atau Instansi terkait;
9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) **BIDANG KEBUDAYAAN**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Kebudayaan.

#### Fungsi

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan Kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Kebijakan teknis di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang Kebudayaan;
5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi, dan perangkat Kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program//kegiatan di bidang Kebudayaan;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengkoordinasian Pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang Kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Kebudayaan;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi/lembaga terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan seniman yang telah berjasa membina Budaya Daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengkayaan sejarah dan purbakalaan;
12. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelompok/sanggar seni budaya dalam rangka Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
13. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

#### **4). BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan pariwisata ;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standarisasi, dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata ;
7. Pelaksanaan program/kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
8. Pengkoordinasian, pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang pengembangan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan program / kegiatan;
9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah dan peluang inventasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan objek wisata daerah;
10. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelayanan pemberian ijin usaha pariwisata di bidang pengembangan pariwisata
11. Pelaksanaan fasilitasi bantuan dan pengembangan untuk pemeliharaan objek dan daya tarik wisata;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yng dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **5). BIDANG SUMBER DAYA**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program/kegiatan pelestarian, pengembangan sumber daya, dan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan.

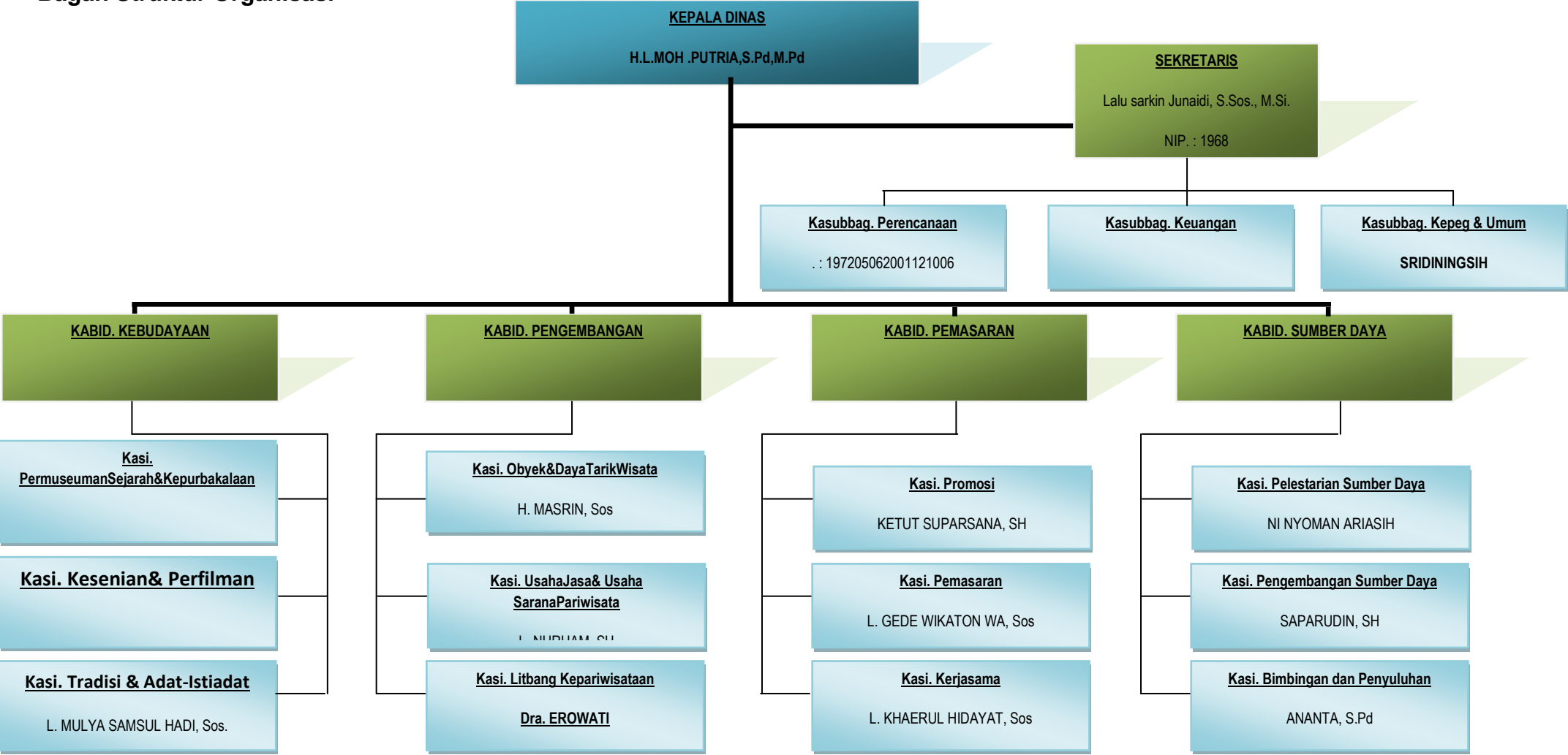
1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran(RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang sumber daya;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi kerja dengan perangkat daerah dan instansi terkait rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang sumberdaya;
6. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pelestarian dan pengembangan sumberdaya serta bimbingan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sumberdaya sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
8. Pelaksanaan pengaturan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap program/kegiatan permasalahan pelestarian dan pengembangan sumberdaya serta bimbingan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tekhnis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi ;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

## **6). BIDANG PEMASARAN**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemasaran Budaya dan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksaaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan pemasaran;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat kerja Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pemasaran;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran sesuai dengan perundang -undang yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang pemasaran budaya dan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
8. Pengkajian dan pemberian pertimbangan tehnis terhadap permasalahan pemasaran dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidangnya.

Bagan Struktur Organisasi



## 2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah dan jenis sumber daya aparatur yang profesional dan memadai dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang ingin mewujudkan kepariwisataan Lombok Tengah yang berdaya saing, berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 79 orang yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan selebihnya adalah fungsional umum yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan PAM Wisata. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini :

**Tabel. 2.1**  
**Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016**

No.	N A M A	L/P	Gol.	ESELON	JABATAN	PEND. TERAKHIR	DIKLAT PIM YANG TELAH DIKUTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. L.MOH. PUTRIA, S. Pd., M. Pd	L	IV/c	II/b	Kepala Dinas	S2		
2	Drs. L. RINJANI, M.Si	L	IV/b	III/a	Sekretaris	S2	PIM III	
3	ANANTA, S. Pd	L	IV/a	IV/a	Kasi	S1		
4	Drs. L. ZAMZURI, MM	L	IV/a	III/b	Kepala Bidang	S2	PIM III	
5	Drs. H. KAMARUDIN, M. Pd	L	IV/a	IV/a	Kasi	S2	ADUM	
6	L. NIKMAN BUKHARI, S. Sos	L	IV/a	III/b	Kepala Bidang	SI	UMM	
7	H. SUHARTONO, S. Sos.,MM	L	IV/a	III/b	Kepala Bidang	S2	PIM IV	
8	NI NYOMAN ARIASIH	P	III/d	IV/a	Kasi	SMA	ADUM	
9	Dra. EROWATI	P	III/d	IV/a	Kasi	S1	ADUM	

10	SRIDININGSIH	P	III/d	IV/a	Kasi	SMA	ADUM	
11	SUKIRMAN, BA	L	III/d	IV/a	Kasi	D3	ADUM	
12	SAPARUDIN, SH	L	III/d	IV/a	Kasi	S1	ADUM	
13	H. MASRIN, S. Sos	L	III/d	IV/a	Kasi	S1	SPADA	
14	L. MULYA SAMSUL HADI, S. Sos	L	III/d	IV/a	Kasi	S1	PIM IV	
15	L. SUNGKUL, S. Pd	L	III/d	III/b	Kepala Bidang	SLTA		
16	HJ. BQ. WIRENEGARAWARTI	P	III/d	IV/a	Kasubbag	S1	ADUM	
17	KETUT SUPARSANA, SH	L	III/d	IV/a	Kasi	S1	PIM IV	
18	RAMDAH, S. Pd. MEDL	L	III/d	-	Fungsional Umum	S2		
19	L. NURHAM, SH	L	III/d	IV/a	Kasi	SI	PIM IV	
20	BURHANUDIN, S. Sos	L	III/d	-	Fungsional Umum			
21	L. KHAERUL HIDAYAT, S. Sos	L	III/d	IV/a	Kasi	S1	ADUM	
22	L. ZULFA HALIM, SE., MT	L	III/d	IV/a	Kasubbag	S1		
23	L GDE WIKATON W.A, S.Sos	L	III/c	IV/a	Kasi	S1		
24	AMIR SUHUDUL HAKUL MUBI, S.Sos	L	III/c	-	Fungsional Umum			
25	PURNA	L	III/b	-	Fungsional Umum	SMA		
26	KUSJAYANDI, SS	L	III/b	-	Fungsional Umum	S1		
27	ANA FATMAWATI, ST	P	III/b	-	Fungsional Umum	S1		
28	SUMBAWATI, SE	P	III/b	-	Fungsional Umum	S1		
29	SUKANDRAWAN WS, SST.PAR	L	III/b	-	Fungsional Umum	S1		
30	MULYADI, SST.PAR	L	III/b	-	Fungsional Umum	S1		
31	H.L.NURHIDAYAT SUHARTA, M,Si	L	III/b	-	Fungsional Umum	S2		
32	MUHAMMAD AMAR, A.Md	L	III/a	-	Fungsional Umum	D3		

33	LALU EDI ISNAENI, SH	L	III/a	-	Fungsional Umum	S1		
34	M. ZAKIUDIN	L	II/d	-	Fungsional Umum	SMK		
35	M. KADRAN HAFIFI, A.Md.Par	L	II/d	-	PAM Wisata	D3		
36	L. PUTRA JONDWI S, A.Md.Par	L	II/d	-	Fungsional Umum	D3		
37	FIRMAN SUTARTO, A.Md	L	II/d	-	Fungsional Umum	D3		
38	MUSLEHUDDIN, A.Md. Par	L	II/d	-	Fungsional Umum	D3		
39	RAHMAYANTI	P	II/d	-	Fungsional Umum	SMK		
40	L. SUMARJAN SUKENDAR	L	II/b	-	Fungsional Umum	SMA		
41	L. AMANAH	L	II/c	-	PAM Wisata	SMA		
42	WIRJAYADI	L	II/b	-	PAM Wisata	SMA		
43	GRADIS	L	II/b	-	PAM Wisata	SMA		
44	MARYUNANI	L	II/b	-	PAM Wisata	SMA		
45	NURSAMADA	L	II/b	-	PAM Wisata	SLTA		
46	MAYA IVRIANA	P	II/b	-	Fungsional Umum	SLTA		
47	BAIQ DEWI ARIYANI	P	II/b	-	Fungsional Umum	SMK		
48	HERMAN	L	II/a	-	PAM Wisata	Paket C		
49	SAHARUDIN		II/a	-	Fungsional Umum			
50	RUSTAM ADI SUCIPTO	L	II/a		Fungsional Umum	SMA		
51	IMRAN	L	II/a		Fungsional Umum	SMA		
52	BQ NURASIAH	L	II/a		Fungsional Umum	SMA		

53	MUHAMAD SARUJI	L	II/a		PAM Wisata	SMA		
54	SEKAR	L	II/a	-	PAM Wisata	SMP		
55	WIDAGDE	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
56	L. ZAENUDIN	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
57	JUMATRA	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
58	L. NURSALAM	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
59	L. MULYADI	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
60	L. ADNAN	L	I/d	-	PAM Wisata	SMP		
61	L. AKMAL	L	I/d	-	PAM Wisata	Paket C		
62	RUDIN	L	I/d	-	PAM Wisata	Paket		
63	L. SUGATRAH		I/d	-	PAM Wisata			
64	L. ALIMAH SAMSUDIN	L	I/d	-	PAM Wisata	Paket B		
65	JOLI WIRAPATONI	L	I/c	-	PAM Wisata	SMP		
66	L. EDI TURMUZI	L	I/c	-	PAM Wisata	SMP		
67	DEMUNG	L	I/c	-	PAM Wisata	SMP		
68	L. PUTRADI	L	I/c	-	PAM Wisata	SMP		
69	RENE	L	I/c	-	PAM Wisata	Paket B		
70	M. ARSIL	L	I/c	-	PAM Wisata	SD		
71	SUPARMAN	L	I/c	-	Fungsional Umum	SD		
72	LAHIR	L	I/c		PAM Wisata	SD		
73	HASBOLLAH	L	I/b	-	PAM Wisata	SD		
74	MERPE	L	I/b	-	PAM Wisata	SD		
75	ZAENUDIN	L	I/b	-	PAM Wisata	SD		
76	SUKUR	L	I/b	-	PAM Wisata	SD		
77	ZULHADI	L	I/b	-	PAM Wisata	SD		
78	L. NURHADI	L	I/a	-	PAM Wisata	SD		
79	L. SAYUTI	L	I/a	-	PAM Wisata	SD		

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

Indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015 sebanyak 5 (lima) buah indikator yang terdiri dari : 1) jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang tersertifikasi, 2). Lama tinggal wisatawan 3). Jumlah kunjungan wisatawan asing, 4) Jumlah wisatawan domestik, dan 5). Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, capaian realisasi periode 2011-2015 terhadap ke 5 indikator adalah sebagai berikut : 1) jumlah tenaga kerja tersertifikasi sebanyak 271 orang dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 270 orang, 2). Lama tinggal wisatawan sebanyak 3,43 hari dengan target RPJMD sebanyak 3,19 hari, 3). Jumlah kunjungan wisatawan asing sebanyak 54.954 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 44.559 orang, 4) Jumlah wisatawan domestik terrealisasi sebanyak 49.766 orang dari target sebanyak 25.532 orang, dan 5). Jumlah event kepariwisataan yang diselenggarakan sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 2011-2015.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan indikator lainnya yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2011-2015 adalah : jumlah obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan seperti : wisata bahari, alam, budaya, dan industri kerajinan. Realisasi ODTW diatas sebanyak 52 buah dari target yang ditetapkan sebanyak 42 buah. Begitu pula dengan asosiasi pemasaran pariwisata yang ditargetkan sebanyak 26 buah pada periode yang sama terrealisasi sebanyak 58 buah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, rata rata capaian realisasi komulatif urusan Pariwisata dan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah sebanyak 113,65%. Suksesi pencapaian indikator kinerja utama ini tidak lepas dari kesepahaman dan komitmen



stakeholders yang dalam pembangunan kepariwisataan daerah, baik tingkat lokal, regional, maupun nasional. Di samping itu dukungan program dan kegiatan dari pemerintah propinsi dan kementrian pariwisata RI memiliki andil yang sangat besar terhadap pencapaian indikator kinerja utama dimaksud.

Persoalan yang ditemui dalam dalam kurun waktu 2011-2015 adalah turunnya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Fluktuasi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara terjadi pada tahun 2014 ini di sebabkan oleh situasi politik menjelang pilpres yang relatif kurang kondusif, mis komunikasi sebagian eks pengguna ROI pantai Kuta, dan penutupan akses penerbangan langsung Sidney – BIL oleh maskapai jetstar Australia.

Rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capain pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.1.	Jumlah Tenaga kerja Kepariwisataa yang tersertifikasi (orang)		186		17	17	17	17	17	17	17	17	20	50	100	100	100	117.65	294.12
2.	Rata-Rata lama tinggal wisatawan (hari)		2.33		2.50	2.67	2.84	3.01	3.18	2.58	2.71	3.55	3.43	3.08	103	101	125	114	97
3.	Jumlah wisatawan asing (orang)		33.007		35.317	37.627	39.937	42.247	44.557	45.509	58.364	77.278	54.954	46.908	129	155	193	130	105
4.	Jumlah Wisatawan domestik (orang)		17.021		18.728	20.425	22.127	23.829	25.531	17.289	23.535	25.150	49.766	53.820	92	115	114	208	211
5	Jumah event kepariwisataan yang terselenggarakan		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

Dalam kurun waktu 2011-2015, total anggaran untuk memenuhi capaian indikator kinerja utama yang meliputi : sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan, lama tinggal wisatawan, jumlah wisatawan domestik, jumlah wisatawan mancanegara, dan event kepariwisataan yang dilaksanakan sebesar Rp. 6.997.185.269,-. Sedangkan total realisasi dalam kurun waktu 2011-2015 sebesar Rp. 6.096.268.459,- (87,12%). Lebih rincinya dapat di lihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah Tenaga kerja Kepariwisata yang tersertifikasi	69.375.000	33.894.458	207.687.561	126.093.000	231.808.100	54.412.500	33.308.500	192.193.000	125.621.600	228.061.700		98.27	92.54	99.63	98.38	27 %	33 %

Rata-Rata lama tinggal wisatawan	122.405.475	390.865.925	717.687.450	1.372.798.000	1.111.433.850		333.923.025	684.577.884	1.366.765.800	1.039.090.400		85.43	95.39	99.56	93.49	55 %	
Jumlah wisatawan asing																	
Jumlah Wisatawan domestik																	
Jumah event kepariwisataan yang terselenggara kan	330.176.500	786.618.500	297.689.050	613.660.500	584.991.900		776.546.500	294.019.050	604.398.500	563.350.000		98.72	98.77	98.49	96.30	12 %	

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **A. Tantangan**

Tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain :

1. Peningkatan pemeliharaan dan pelestarian nilai budaya, nilai kearifan lokal, nilai solidaritas sosial, dan keramah tamahan yang menjadi identitas budaya daerah yang berfungsi sebagai perekat persatuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan benda cagar budaya.
3. Peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya.
4. Peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, terutama karya seni dan budaya, baik yang bersifat individu maupun kolektif.
5. Peningkatan upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dalam rangka pengembangan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya kebudayaan dan kepariwisataan yang didukung kelembagaan yang mandiri dengan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif.
8. Peningkatan efektifitas pemasaran pariwisata, sehingga mampu secara efektif menjangkau pasar yang lebih luas.
9. Peningkatan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya melalui sosialisasi atau penyuluhan.

10. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata dalam rangka meningkatkan minat investor berinvestasi di Nusa Tenggara Barat.
11. Peningkatan dan pengembangan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif di bidang Pariwisata dan Kebudayaan antara pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain guna mendukung perkembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah.

## **B. Peluang**

1. Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah yang terus berkembang dengan segala potensi dan keunikannya serta nilai budaya dan kearifan lokal yang memiliki nilai jual tinggi dan pangsa pasar yang luas di dalam dan luar negeri;
2. Pendaftaran benda cagar budaya dilakukan secara manual dan online agar lebih efektif dan efisien.
3. Minat investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Barat semakin besar seiring dengan keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
4. Pembangunan sektor pariwisata sebagai prioritas kedua dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dengan 11 (sebelas) kawasan, 4 (empat) kawasan di Pulau Lombok dan 7 (tujuh) kawasan di Pulau Sumbawa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda), memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang bernilai jual tinggi dan berdayasaing;
5. Masyarakat dengan segala keragaman budaya dan kearifan lokalnya, dengan atraksi seni dan budaya yang beraneka ragam, juga menjadi potensi besar untuk dikembangkan dan dijual sebagai daya tarik;

6. Aksesibilitas dan Konektivitas dari dan ke Nusa Tenggara Barat, baik darat, laut maupun udara semakin tersedia dan lancar. Frekwensi penerbangan langsung ke dan dari daerah-daerah yang menjadi pasar pariwisata Nusa Tenggara Barat semakin diperbanyak, begitu juga dengan penerbangan langsung ke beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan Jeddah sangat berpeluang untuk ditambah frekwensinya agar arus wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat semakin besar;
7. Komitmen pemerintah menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai Gerbang Pariwisata Nasional, mengharuskan pemerintah lebih memperhatikan keseimbangan investasi di bidang kepariwisataan dalam Koridor V MP3EI, sehingga tidak terjadi ketimpangan investasi yang terlalu mencolok antara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
8. Regulasi-regulasi untuk mengatur ketimpangan ini sangat diperlukan untuk pemerataan pembangunan.

#### **1. Analisis Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Review pelaksanaan renstra periode 2011-2015 terhadap renstra kementerian pariwisata, renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi, dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan adanya variasi target indikator yang dicapai. Perbedaan indikator menyangkut : Jumlah Tenaga kerja Kepariwisata yang tersertifikasi, rata rata lama tinggal wisatawan, dan jumlah event kepariwisataan yang diselenggarakan. Sedangkan indikator yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran renstra kementerian pariwisata dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi adalah Jumlah wisatawan asing dan Jumlah Wisatawan domestik.

Capaian realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 sebanyak 54.954 orang dan kunjungan wisatawan domestik sebanyak 49.766 orang. Apabila dilihat dari prosentase capaian indikator kinerja dalam kurun waktu yang sama, menunjukkan bahwa capaian realisasi renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah melampaui renstra Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi NTB atau rata rata sebesar 36,5 %. Kondisi ini adalah implikasi dari komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pariwisata sebagai sektor unggulan. Rincian indikator kinerja berupa komparasi capaian sasaran renstra SKPD terhadap sasaran renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD**  
**Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Jumlah Tenaga kerja Kepariwisata yang tersertifikasi	142 %	-	-
2.	Rata-Rata lama tinggal wisatawan	108 %	-	-
3.	Jumlah wisatawan asing	142 %	104 %	222 %
4.	Jumlah Wisatawan domestic	148%	113 %	200 %
5.	Jumah event kepariwisataan yang diselenggarakan	100 %	-	-

## 2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan hasil telaah struktur tata ruang wilayah kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukenali bahwa penentuan pemanfaatan perwilayahan didasarkan pada potensi dan karakteristik wilayah perencanaan. Pembagian struktur tata ruang wilayah yang ada dalam RTRW terdiri atas wilayah Utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Wilayah utara adalah wilayah pembangunan yang dihajadkan untuk konservasi dan pertanian. Sementara itu, di dalam Review Rencana Induk Kepariwisata Daerah/RIPARDA Kabupaten Lombok Tengah



wilayah utara di kembangkan sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata dengan harapan pembangunan tracking Rinjani sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemudian wilayah tengah merupakan wilayah pembangunan sebagai pusat pelayanan umum skala Kabupaten, pusat pelayanan perhubungan udara internasional dan kegiatan pertanian. Hal tersebut sangat berkaitan dengan rencana pembangunan kepariwisataan daerah yang tertuang dalam RIPARDA yang menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan di wilayah tengah di kembangkan sebagai kawasan *home industry*. Pengembangan sebagai Kawasan *home industry* ini sejalan dengan pembangunan wilayah tengah sebagai pusat pelayanan umum skala kabupaten. Begitu pula dengan wilayah pembangunan bagian selatan di dalam RTRW diperuntukan bagi pariwisata dan pertanian. Peruntukan khususnya bagi pengembangan pariwisata sejalan dengan pembagian tata ruang perwilayahan yang tertuang di dalam RIPARDA bahwa bagian selatan dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan wisata budaya. Oleh karenanya, Berpijak pada konsep perwilayahan tersebut diatas maka konsep perencanaan tata ruang wilayah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan erat dengan RIPARDA Kabupaten Lombok Tengah. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan di sektor Pariwisata dan Kebudayaan, untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.5 di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
	A. Titik-Titik simpul kegiatan	<b>1. Praya sebagai pusat pelayanan, yaitu :</b>	<b>1. Rencana Pola pemanfaatan Kawasan Hutan lindung :</b>		
	1. Pusat-pusat permukiman perkotaan yang utama terdiri dari : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	pusat pemerintahan, pendidikan dan budaya skala regional, pusat perekonomian, jasa dan perdagangan wilayah regional dan pusat pelayanan kesehatan regional	a. Rencana Alokasi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan ; Kopang, Praya Barat, Praya Barat Daya, Pringgarata, Pujut, dan Batukliang Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praya merupakan pusat pengembangan home industry, pengembangan usaha jasa kepariwisataan, pengembangan pendidikan kepariwisataan.</li> <li>• Sengkol Sebagai simpul jaringan transportasi lokal maupun regional, terkait dengan BIL</li> <li>• Tanak Awu Sebagai pusat pelayanan udara skala internasional dan pengembangan kawasan tanak awu sebagai area kebodasi.</li> <li>• Mantang dan Janapria Sebagai pusat kerajinan</li> <li>• Selong</li> </ul>	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Praya dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Mantang, Sengkol, Selong Belanak, Janapria, dan Tanak Awu

				Belanak Sebagai pusat kawasan wisata	
	2. Kawasan Pariwisata sebagai kawasan budidaya pembangkit kegiatan wilayah	<b>2. Mantang sebagai pusat pelayanan, yaitu :</b>	<b>2. Rencana Pola pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat :</b>		Kuta, Selong Belanak, dan Sade
	3. Pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah di Praya	Pusat pengembangan permukiman, kegiatan industri kecil dan rumah tangga serta sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian			
	4. Simpul-simpul transportasi yaitu :		a. Kawasan Sempadan pantai yang meliputi :		
	a. Terminal Regional Tipe A di kota Praya	<b>3. Pusat pelayanan sengkol sebagai :</b>	Teluk Awang, Bumbang, pantai Gerupuk, A'an, Banut, Seger, Mawun, Tampah, Mawi, Rowok, Selong belanak, Tomang-omang, Serangan dan pantai Torok aik belek		
	b. Rencana pengembangan Bandar Udara Lombok Baru di Desa Tanak Awu.	Pusat pengembangan permukiman, pelayanan pendukung pariwisata, kegiatan industri kecil dan rumah tangga, perikanan skala kabupaten dan pusat pengembangan kegiatan pertanian.	b. Kawasan Sempadan Sungai, tersebar di masing-masing kecamatan, terutama kawasan selatan Pulau Lombok dari sekotong sampai Pujut		
			c. Kawasan Sempadan jurang		

	B. Jalur-jalur penghubung antar kegiatan	<b>4. Janapria sebagai pusat pelayanan :</b>	d. Kawasan Sekitar Mata Air, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, antara lain mata air Aik Bone di Batukliang Utara dan Nyeredep di Kec. Kopang		
	1. Jalur Arteri Primer : menghubungkan antar ibukota Provinsi dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghubungkan kota Orde I dengan kota Orde I maupun kota Orde I dengan kota Orde II.	Pengembangan permukiman dan pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga.	e. Kawasan sekitar waduk/Danau :		
	a. Jalur Ruak – Lembar		Waduk batu jai di Kecamatan praya dan waduk pengga di Kecamatan Praya Barat		
	b. Jalur Mataram – Praya – Selong	<b>5. Pusat pelayanan Selong Belanak dengan fungsi :</b>	f. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) :		
	c. Jalur Mataram – Bandara – Kuta	Pusat pengembangan Pemukiman, dan pelayanan fasilitas pendukung pariwisata	RTH/Ruang Bebas sekitar Bandara dan RTH sebagai Taman Kota		
	2. Jalur Arteri Sekunder : menghubungkan antar dua pusat pertumbuhan utama di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yang menghubungkan WP Lombok tengah bagian Tengah dan WP Lombok Tengah Bagian Selatan.	<b>6. Pusat pelayanan Tanak Awu dengan fungsi :</b>	<b>3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya :</b>		

	Jalur arteri sekunder ini adalah :	Pusat pelayanan perhubungan udara skala internasional dan pengembangan permukiman	a. Kawasan Hutan suaka; Gunung Rinjani mencakup Batukliang dan Pringgarata		
	a. Jalur Praya – Penujak – Bandara		b. Kawasan Suaka marga satwa; mencakup Kecamatan batukliang dan Kopang		
	b. Jalur Praya – Sengkol – Tanak Awu	<b>7. Pusat pelayanan IKK lainnya (lingkup kecamatan ) dengan fungsi :</b>	c. Kawasan Taman Nasional; Taman Nasional Gunung Rinjani		
		Pusat kegiatan transportasi kecamatan, pemerintahan kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pengembangan permukiman dan pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga	d. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan; Makam seriwe, nyatok, Ketaq, dan Bile Tawah, Situs Batu Rijang, Masjid Gunung Pujut dan Rambitan, Desa Tradisional sade		
	3. Jalur kolektor primer : menghubungkan antar kota kabupaten dalam satu Provinsi atau antar kota Orde II dengan kota Orde II.	<b>8. Pusat Pelayanan Orde IV yang merupakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) berfungsi sebagai :</b>			
	Jalur kolektor primer ini adalah :	Pusat permukiman desa, pemerintahan desa, keg. Perdagangan dan jasa beberapa desa, pendidikan dan kesehatan beberapa desa, serta pusat kegiatan transportasi antar beberapa desa.	<b>4. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya;</b>		
	a. Jalur Mataram – Kediri – Praya – Penujak – Bandar Udara		Berupa perairan laut, darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol		

	Merupakan jalur eksisting yang menghubungkan Mataram dengan Praya.				
			<b>5. Kawasan Rawan Bencana :</b>		
	b. Bandar Udara – Sengkol – Kuta		a. Kawasan Rawan Bencana Gunung Vulkanik; Kecamatan Batukliang termasuk kawasan Gunung Rinjani		
	Berfungsi primer karena diarahka guna menunjang sektor pariwisata utama di Kabupaten Lombok Tengah dan dekat dengan Bandar Udara.		b. Kawasan Rawan Banjir; Batukliang Utara dan Kopang		
			c. Kawasan Rawan Kekeringan; Kecamatan Praya Timur, Praya Barat, Praya barat daya dan Pujut		
	c. Bandar Udara – Sengkol – Batunyal – Praya – Kopang		d. Kawasan Rawan Gempa Bumi; Batukliang Utara, Jonggat, Praya Barat Daya, Praya barat dan Pujut		
	Dikembangkan sebagai jalur alternatif dari Bandar Udara guna mengakses jalan arteri primer satu-satunya di Pulau Lombok, yakni ruas jalan yang menghubungkan Mataram dengan Labuhan Lombok di Lombok Timur		e. Kawasan Rawan Tsunami; Sepanjang pesisir pantai selatan Lombok		
	4. Jalur Kjolektor sekunder : menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah kabupaten, yaitu :				
	a. Penujak –				

	Selong Belanak				
	b. Batunyalu – Pejanggik – Muju				
	5. Jalur lokal : menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah.				

Selanjutnya, Rencana pola pemanfaatan ruang menggambarkan lokasi, luasan, dan fungsi dari kegiatan kegiatan lindung dan budi daya. Isi rencana pola pemanfaatan ruang adalah deliniasi kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan kawasan kawasan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan kawasan pariwisata selalu bersinggungan dengan wilayah dimaksud. Namun demikian pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan daya dukung kawasan. Sebagai misal, kawasan utara yang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata harus bijaksana dalam pembangunan pariwisata, karena kawasan ini merupakan kawasan resapan air. Begitu pula dengan kawasan tengah, merupakan kawasan sekitar waduk Batujai dan Pengga dengan radius sempadan kawasan sejauh 200 m.

Kemudian kawasan bagian selatan yang merupakan kawasan sempadan pantai, perlindungan kawasan sepanjang pantai memiliki arti penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Oleh karenanya, rencana pola pemanfaatan ruang wilayah pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah :

**Tabel 2.6**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Prog. Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	1. Wisata Pantai	1. Kawasan wisata Kute dan sekitarnya (Desa Kute, Sukadana Kecamatan Pujut)	1. Tertatanya roi pantai dan kawasan sekitar pantai sebagai obyek dan daya tarik wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas kawasan ROI Pantai melalui penertiban pembangunan fisik konstruksi di kawasan tersebut.</li> </ul>	Kec. Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur dan Pujut
	2. Wisata Gunung dan Hutan	2. Kawasan wisata Selong Belanak dan sekitarnya (Desa selong Belanak Kecamatan Praya Barat)	2. Tertatanya wisata alam (gunung dan hutan) sebagai obyek dan daya tarik wisata.	Pembangunan kawasan ekowisata berdasarkan kemampuan daya dukung alam.	Kec. Batukliang Utara dan Kopang
	3. Agro Wisata, Wisata Budaya, Wisata Sejarah, dll	3. Kawasan desa wisata Sade dan sekitarnya (desa Rembitan Kecamatan Pujut)	3. Tertatanya kawasan desa wisata	Pembangunan kawasan agro wisata, wisata sejarah, dll	Kec. Batukliang, Praya, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah, Pringgarata, Pujut, Kopang, Jonggat dan Janapria)

3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan SKPD



**Tabel 2.6**  
**Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Lombok Tengah**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayan SKPD	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat keretanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berikut ini disajikan rincian indentifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2011-2015 tertuang dalam tabel 3.1.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah**

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan SKPD :	Obyek wisata yang sudah dikelola antara lain :	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Pemberdayaan pam wisata dan pokdarwis	Faktor keamanan	Belum optimalnya pengelolaan ODTW,
	1. Kute dan sekitarnya	Jumlah rata-rata lama tinggal wisatawan	Kemampuan mengikuti event promosi pariwisata	Jumlah tawaran promosi pariwisata	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata,
	2. Selong blanak dan sekitarnya	Angka criminal dikawasan pariwisata	Belum ada data base event wisata		Masih rendahnya tingkat keamanan objek pariwisata
	3. Kampung adat sade	Jumlah promosi pariwisata yang diadakan dan diikuti SKPD			Belum optimalnya promosi wisata
	4. Benang stokol dan sekitarnya	Jumlah event wisatawan tahunan yang bisa mendatangkan wisatawan skala besar			Masih terbatasnya jumlah event wisata tahunan

	5. Aik buaq dan sekitarnya	Jumlah pelatihan/peningkatan kapasitas dan peserta pelaku wisata yang bersertifikasi			
	Ada sebagian ODTW yang belum memiliki sarana penunjang (mushalla, toilte dan shelter)				
	Promosi yang dilaksanakan hanya promosi dalam negeri				
	Event wisata yang diselenggarakan :				
	1. Core event bau nyale	Adanya Forum Pelaku Pariwisata			
	2.Perang timbung				
Kajian terhadap renstra SKPD/Provinsi/Kabupaten/Kota :	1. Meningkatkan jumlah wisatawan asing di provinsi NTB	1. Prosentase realisasi (104%)			
	2. Meningkatkan Jumlah kunjungan domestik	2. Prosentase realisasi (113%)			
Kajian Terhadap Renstra K/L :	1. Meningkatkan jumlah wisatawan asing di provinsi NTB	1. Prosentase realisasi (222%)			
	2. Meningkatkan Jumlah kunjungan domestik	2. Prosentase realisasi (200%)			

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dalam mengemban tugas dan fungsi pelayanan SKPD seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1.1 di atas, adalah belum optimalnya pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata. Lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata tersebut menyangkut : terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang wisata, pementasan seni pertunjukan sebagai daya tarik wisata yang masih kurang, promosi pariwisata belum optimal, dan tingkat keamanan di beberapa jalan menuju objek dan daya tarik wisata yang masih memprihatinkan.

Di satu sisi, Kabupaten Lombok Tengah memiliki kekuatan yang menjadi modal utama pembangunan pariwisata. Modal tersebut berupa kondisi alam yang sangat indah dan alami, keaslian adat dan budaya yang masih terjaga, kondisi infrastruktur jalan yang sangat memadai menuju objek wisata, dan lain sebagainya. Sedangkan peluang dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah sangatlah terbuka, mengingat komitmen kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah periode 2016-2021 yang menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan utama daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, strategi yang dapat dilakukan berupa : peningkatan kualitas manajemen atraksi wisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan, pengembangan/revitalisasi/produk wisata dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung untuk merangsang pertumbuhan pasar, mengoptimalkan promosi pariwisata kepada target pasar nasional dan internasional dengan menggunakan media komunikasi yang terpadu, mengoptimalkan pementasan seni pertunjukan budaya daerah melalui keikutsertaan sebagai partisipan pada event-event budaya yang diselenggarakan oleh Kabupaten lain maupun yang diselenggarakan oleh Disbudpar NTB, seperti : Bulan Citra Budaya NTB, Festival Senggigi, dan berbagi event lainnya baik yang diselenggarakan di Prop. NTB maupun luar daerah. Sedangkan khusus untuk peningkatan kualitas keamanan, langkah yang dapat ditempuh adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung iklim pembangunan pariwisata yang kondusif melalui pemberian peran pokdarwis di kawasan wisata, mengoptimalkan peran pam wisata, meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait, dan mengoptimalkan pemberitaan kondisi aman di Kabupaten Lombok Tengah melalui website.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dalam konteks percepatan pembangunan pariwisata daerah, peran pemerintah daerah sangatlah diperlukan dalam rangka meningkatkan sinergitas khususnya antar SKPD untuk mendukung percepatan pembangunan kepariwisataan daerah melalui penyusunan program dan kegiatan yang memiliki mata rantai yang sangat dekat dengan pembangunan kepariwisataan. Disamping itu, pemahaman, komitmen, dan tindakan nyata

stakeholder dalam akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah merupakan kunci sukses pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya, isu isu strategis lingkungan eksternal memiliki andil yang sangat kuat terhadap percepatan pembangunan pariwisata daerah. Isu isu tersebut sangatlah variatif bergantung pada dinamika perkembangan pariwisata terkini baik pada tataran lokal, regional, maupun global. Jika dipetakan secara detail isu isu strategis kepariwisataan di lingkungan eksternal berdasarkan analisis SWOT, maka dapat ditemukan langkah strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan pariwisata daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan/revitalisasi/produk wisata konvensional ke produk wisata minat khusus yang bertemakan wisata syariah
2. Peningkatan sistem pengamanan dengan melibatkan peranserta masyarakat
3. Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam mendukung profesionalisme pembangunan kepariwisataan
4. Pemberian peran kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung terwujudnya iklim wisata yang bernuansa sapta pesona

3.2. Identifikasi Isu-Isu Startegis (Lingkungan Eksternal)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
	1. Perkembangan trend pasar yang cenderung memilih wisata bertemakan wisata minat khusus ( <i>special interest tourism</i> ).	1. Diberlakukannya MEA	1. Lombok sebagai destinasi berlabel halal <i>destination</i> dan <i>the best honeymoon destination</i>	1. Dibangunnya Sekolah Tinggi pariwisata Negeri di Lombok Tengah
	2. Tuntutan adanya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di sekitar kawasan wisata ( <i>Millenium Development Goals</i> )	2. Pengembangan wisata syariah di Indonesia	2. Akselerasi pembangunan pariwisata kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK)	2. Perkembangnya wisata MICE ( <i>Meeting, Isentive, Conference, and Exebition</i> )
	3. Munculnya ancaman/kerawanan bencana serta ketidakpastian cuaca di seluruh dunia ( <i>global warming</i> )	3. Situasi keamanan dan politik dalam negeri	3. Rencana pembukaan jalur penerbangan Lombok – Luar Negeri	
	4. Ekspansi tenaga kerja asing dan terbukanya investasi secara luas, tuntutan standar internasional dalam pelayanan pariwisata.	4. Terorisme, tingginya angka kecelakaan pesawat udara, dan penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba bagi warga negara asing berdampak pada dikeluarkannya travel warning ke Indonesia	4. Keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);	
	5. Munculnya virus zika yang mengancam pariwisata dunia		5. Pembangunan sektor pariwisata sebagai prioritas pertama, prioritas kedua dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, prioritas kelima untuk prioritas pembangunan skala nasional.	

### 3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021. Terwujudnya pelaksanaan visi dan misi tersebut memerlukan sinergitas, komitmen, dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2016-2021. Adapun Visi yang ingin dicapai adalah: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**.

Keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Lombok Tengah sangat bergantung dari jabaran Misi yang ada. Adapun Misi Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian Dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai Nilai Agama Dan Kearifan Lokal
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan Dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan Dan Kesenjangan Gender
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas
4. Menjaga Keselarasan, Kesenjangan Dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan Dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur Yang Memadai
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Berkaitan dengan Misi diatas, pelaksanaan tugas dan fungsi yang relevan dan berkaitan langsung dengan kepariwisataan dan kebudayaan daerah adalah : 1). **Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal** 2). **mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas, dan** 3). **mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.**

Berpedoman pada Misi RPJMD 2016-2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sasaran, dan kajian lainnya yang relevan, termasuk di dalamnya menyangkut faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3.2.1 di bawah ini.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah**

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Belum adanya kalender event kebudayaan kabupaten.	1. Belum dilaksanakan pendataan yang menyeluruh terhadap situs/cagar benda kebudayaan yang ada	1. Adanya kerjasama dengan balai cagar budaya bali
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		2. Belum ditetapkannya event budaya yang akan menjadi kalender tahunan	
		2. Belum adanya data base situs/cagar benda budayaan yang jelas.	3. Belum adanya indikator penentuan keberhasilan pembinaan terhadap group kesenian/kebudayan yang ada	
		3. Belum termonitornya dan terevaluasi hasil pembinaan kepada group-group kesenian (belum ada tolak ukur /indicator) yang jelas)	4. Belum adanya jadwal yang rutin untuk melakukan pembinaan	
2	<b>Misi 3 : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS</b>			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Belum adanya kalender kegiatan pariwisata	1. Belum dilaksanakan pendataan yang terhadap kegiatan kepariwisataan	Adanya web site Disbudpar
		2. Kurangnya data statistic kepariwisataan yang akurat dan up to date	2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.	Adanya Pam Wisata dan Pokdarwis
		3. Kurangnya kerjasama promosi dengan pihak ke – 3	3. Belum terbentuknya BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Adanya Forum Pelaku Pariwisata
		4. Kurang optimalnya pemasaran promosi di dalam dan luar negeri	4. Kurangnya kerjasama anta pelaku wisatawan dengan dinas	Adanya Forum Pelaku Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Kurang tersedianya sarana penunjang pariwisata di ODTW	1. Belum adanya Perda tentang Ripparda	1. Dibentuknya KEK Mandlika
		2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan sarana prasarana priwisata di ODTW	2. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar ODTW	2. DMO Rinjani



### **3.4. Telahaan Renstra K/L dan Renstra SKPD**

Kontribusi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Lombok Tengah terhadap kumulatif kunjungan wisatawan di tingkat nasional relatif kecil. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan ODTW. Rendahnya pengelolaan ODTW adalah implikasi dari terbatasnya prasyarat prasyarat yang harus dipenuhi di dalam pengembangan pariwisata. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3.3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.3.1**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor penghambat dan  
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Tercapainya angka kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta orang / tahun	Belum optimalnya pengelolaan ODTW	Belum adanya detail siteplan pariwisata	Pengembangan KEK Mandalika
	Tercapainya angka kunjungan wisatawan domestik 275 juta orang / tahun	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata,	Terbatasnya alokasi anggaran	Program Seluruh SKPD untuk mendukung Pariwisata sebagai sektor unggulan di Kab Lombok Tengah.
		Belum optimalnya promosi wisata	Belum terbentuknya BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Terbentuknya PHRI, HPI dan Forum-Forum Promosi
		Masih terbatasnya jumlah event wisata tahunan	Belum dilaksanakan pendataan seni dan budaya daerah sebagai event sebagai daya tarik wisata	Terbentuknya Dewan Kesenian daerah
		Masih terbatasnya jumlah event wisata tahunan	Belum dilaksanakan pendataan seni dan budaya daerah sebagai event sebagai daya tarik wisata	Terbentuknya Dewan Kesenian daerah
		Masih rendahnya tingkat keamanan objek pariwisata	Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar ODTW	Terbentuknya Pokdarwis

Bila dilihat dari kontribusi pembentukan angka kunjungan wisatawan pada tataran propinsi NTB, Kabupaten Lombok Tengah menyumbang angka kunjungan wisatawan yang relatif besar. Namun demikian, besarnya angka kunjungan pada tataran propinsi NTB belumlah mengembirakan apabila dikaitkan dengan jumlah dan variasi objek dan daya tarik wisata ditawarkan atau dapat dikatakan kunjungan wisatawan belum sebanding dengan harapan rasional yang ingin dicapai. Beberapa hal yang menimbulkan permasalahan pelayanan khususnya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel 3.3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.3.2**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**  
**Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tercapainya angka kunjungan mancanegara 565.944	Belum optimalnya pengelolaan ODTW,	Belum adanya detail siteplan pariwisata	Dibentuknya KEK Mandalika
2	Tercapainya angka kunjungan nusantara 791.658	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata,	Terbatasnya alokasi anggaran	Pariwisata sebagai sektor unggulan di Kab Lombok Tengah.
		Belum optimalnya promosi wisata	Belum terbentuknya BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)	Dibentuknya DMO Rinjani dan DMO Mandalika
		Masih rendahnya tingkat keamanan objek parwisata	Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar ODTW	Terbentuknya Pokdarwis
		Masih terbatasnya jumlah event wisata tahunan	Belum dilaksanakan pendataan seni dan budaya daerah sebagai event sebagai daya tarik wisata	Terbentuknya Dewan Kesenian daerah

**3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan pendekatan sistem perwilayahan yang merupakan kombinasi pendekatan fisik kawasan, fungsional, dan administratif. Berikut ini permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan telahaan rencana Tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, lihat tabel 3.6 di bawah ini.

**Tabel 3.4.1**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Telaahan Rencana**  
**Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**  
**Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kawasan utara direncanakan untuk kawasan ekowisata	Rencana pembangunan parwisata skala besar oleh investor terbentur status kawasan.	Kawasan ekowisata berada di wilayah hutan lindung	Ditetapkannya Gunung Rinjani sebagai Geopark dunia
	Kawasan Tengah home industri rumah tangga dan wisata budaya, wisata sejarah	Pembangunan kawasan waduk Batujai yang .direncanakan sebagai pusat pemetasan wisata pertunjukan budaya dan sebagai centra promosi home industry terbentur oleh status pengelolaan	Pengelolaan waduk Batujai merupakan kewenangan pemerintah propinsi	Posisi waduk Batujai berada di tengah kota yang sangat cocok sebagai pengembangan pariwisata kota berbasis tepian air ( <i>tourism water front city</i> )
	Kawasan Selatan sebagai kawasan wisata bahari	Investor urung menanamkan modalnya di bidang kepariwisataan	Belum tersedianya detail tata ruang pembangunan kawasan pantai.	Pembangunan kawasan ekonomi khusus di kawasan Mandalika

**Tabel 3.4.2**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.5.1  
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Tercantum dalam visi, misi	25
2.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra k/L atau renstra provinsi/kabupaten/kota	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
6.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
	Total	100

Tabel 3.5.2.  
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Startegis	Nilai Skala Kriteria Ke -						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Lombok memiliki predikat sebagai : dianugerahkan sebagai predikat <i>the best halal on the word</i> dan <i>the best honeymoon on the word</i>	-	20	20	15	10	10	75
2	Akselerasi pembangunan pariwisata kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK)	25	20	20	15	10	10	100
3	Rencana pembukaan jalur penerbangan Lombok – Luar Negeri	-	20	20	-	-	10	50
4	Keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);	-	20	20	-	-	10	50
5	Pembangunan sektor pariwisata sebagai prioritas pertama, prioritas kedua dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, prioritas kelima untuk prioritas pembangunan skala nasional.	25	20	20	15	10	10	100
6	Komitmen pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai Gerbang Pariwisata Nasional.	-	20	20	-	-	10	50

Tabel 3.5.3.  
Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Prioritas
1	2	3	4
1	Lombok sebagai destinasi berlabel halal destination dan the best honeymoon destination	75	III
2	Akselerasi pembangunan pariwisata kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK)	100	II
3	Rencana pembukaan jalur penerbangan Lombok – Luar Negeri	50	V
4	Keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);	50	VI

5	Pembangunan sektor pariwisata sebagai prioritas pertama, prioritas kedua dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, prioritas kelima untuk prioritas pembangunan skala nasional.	100	I
6	6. Komitmen pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai Gerbang Pariwisata Nasional.	50	IV

BAB IV

TUJUAN DANA SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Terwujudnya visi Lombok Tengah sebagai masyarakat yang beriman, sejahtera, dan bermutu melalui peningkatan kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat dengan perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan kamtibmas, serta perwujudan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas adalah cita cita yang ingin diraih di dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

Perkuatan struktur ekonomi masyarakat khususnya melalui sektor kepariwisataan merupakan terobosan yang brilian mengingat peranan penting sektor kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sifat dasar kepariwisataan itu sendiri memberikan *multiflier effect* yang sangat dirasakan oleh masyarakat terbawah. Namun demikian, pengkemasan daya tarik wisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional dengan memperhatikan kaidah kaidah hukum pasar yang berlaku, yaitu mendorong peningkatan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Kabupaten Lombok Tengah dalam peta kepariwisataan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021, perumusan tujuan dan sasaran sebagai langkah yang lebih operasional mutlak diperlukan. Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, seperti yang tertuang dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah  
Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kelestarian Keragaman Budaya Daerah	Pelestari kakayaan budaya daearh	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	10	10	10	10	10
			Jumlah situs yang dilestarikan	7	7	9	11	13
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah seni pertunjukan yang layak pentas	10	10	15	20	25
		Penyelenggaraa	Jumlah Event	3	4	4	4	4

		n event budaya daerah	Seni Budaya					
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi	Pengembangan pariwisata	Kunjungan wisman (orang)	81.898	90.088	99.097	109.006	119.907
			Kunjungan wisnu (orang)	113.959	125.355	137.890	151.697	166.847
			Rata-rata lama tinggal (hari)	3,25	3,50	3,75	4.00	4,25
		Pengembangan destinasi	Jumlah sarpras yg dibangun	2	2	10	2	2
			Jumlah Desa wisata layak jual	6	8	10	12	14
		Pengembangan promosi	Jumlah event promosi	5	5	5	5	5
			Jumlah Media promosi	3	4	4	4	4
			Jumlah TIC	1	4	8	12	14
		Pengembangan SDM Pariwisata	Pokdarwis aktif	5	10	15	20	25
			Tenaga tersertifikasi	377	397	417	437	457

4.2.
Strategi dan kebijakan

Mengacu pada hasil kajian kepariwisataan Kabupaten Lombok Tengah, maka gambaran pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, maka pencapaian visi yang dijabarkan ke dalam misi Bupati dan wakil Bupati periode 2016-2021 yang relevan dengan tugas dan fungsi dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat dengan perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan kamtibmas, dan perwujudan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah strategi dan kebijakan yang di perlukan adalah sebagai berikut, lihat tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
MISI I : Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian Dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Kelestarian Keragaman Budaya Daerah	Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah	Pelestarin kakayaan budaya daearh	Inventarisasi dan asesment tradisi
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Pemeliharaan situys budaya
		Penyelenggaraan event budaya daerah	Pembinanaan seni budaya Pementasan seni budaya
Misi III : Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan



Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi	Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan amenitas pariwisata</li><li>• Pengembangan DTW baru</li></ul>
		Pengembangan pomosi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan promosi berbasis IT.</li><li>• Peningkatan frekwensi event promosi, Pemilihan media promosi, Pengembangan TIC</li></ul>
		Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diklat dan sertifikasi SDM Pariwisata</li><li>• Pengembangan kapasitas Pokdarwis</li></ul>
Misi II : Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas			
Tujuan	Sasaran		Kebijakan
Meningkatnya kapasitas pemda dalam pelayanan public	Tersedianya aparatur yang berkompeten	Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi SDM Aparatur di bidang kepariwisataan.
	Tersedinya sarana dan prasarana yang memadai		Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
	Tertatanya administrasi perkantoran	Revitalisasi	Administrasi Opd
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Koordinasi, fasilitasi, dan edukasi.	Penerapan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan
	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai	Intensifikasi dan koordinasi	Pengelolaan, pemungutan dan pelaksanaaan, sumber daya pegelola (pendapatan asli daerah)
	Terwujudnya pengelolaan arsip yang berkualitas	Inventarisasi dan revitalisasi	Pengembangan tertib Arsip daerah
	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas	Inventarisasi dan validasi data secara manual dan <i>on line</i> .	Mengembangkan kemitraan pendataan dengan pelaku wisata.
	Terwujudnya perencanaan kepariwisataan yang komprehensif	Koordinasi, evaluasi, sinergi, fasilitasi dan inovasi.	Pengembangan sistem informasi pariwisata.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Strategis (renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021, merupakan dokumen yang menjadi acuan kerja dalam jangka menengah. Dokumen ini dihadapkan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan mewujudkan kepariwisataan Lombok Tengah yang berdaya saing, berkelanjutan, memiliki posisi strategis nasional, mampu meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penyusunan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan untuk mengantisipasi kerentanan sektor kepariwisataan terhadap berbagai isu baik pada tataran lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki andil terhadap perkembangan kepariwisataan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dokumen renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 ini, memuat uraian berbagai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi dalam kurun waktu yang sama. Berikut ini rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dimaksud, seperti yang ditunjukan oleh tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD D Pena nggu ng Jawa b	Lokasi
					Tahun – 1		Tahun – 2		Tahun – 3		Tahun – 4		Tahun – 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
Pelestarian Keragaman Budaya	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya yang mendukung penguatan budaya dan pengembangan pariwisata daerah		Program Pengelolaan Keragaman Budaya ;	Persentase tradisi dan situs budaya yang dilestarikan	5		5		5		5		5		5			
			Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	10		10		10		10		10		10			
				Jumlah situs yang dilestarikan	7		7		9		9		11		13			
			Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah seni pertunjukan yang layak pentas	10		10		15		20		25		25			
			Penyelenggaraan Event Budaya Daerah	Jumlah Event seni budaya	3		4		4		4		4		19			

Pengelolaan Pariwisata Menjadi Destinasi Utama di NTB	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Kuantitas Destinasi Angka Kunjungan	Pengembangan Pariwisata	Angka kunjungan wisman	81.898		90.088		99.097		109.006		119.907		119.907			
				Angka kunjungan wisnu	113.595		125.355		137.890		151.679		166.847		166.847			
				Lama Tinggal														
			Pengembangan Destinasi	Jumlah Sarpras Pariwisata yang dibangun	2		2		2		2		2		14			
				Jumlah Desa Wisata Layak Jual	6		8		10		12		14		14			
			Pengembangan Promosi	Jumlah Event Promosi	5		5		5		5		5		25			
				Jumlah Media Promosi	3		4		4		4		4		4			
				Jumlah TIC	1		4		8		12		14		14			
			Pengembangan SDM	Jumlah SDM Pariwisata Tersertifikasi	377		397		417		437		457		457			
				Jumlah Pokdarwis Aktif	5		10		15		20		25		25			
Meningkatnya kapasitas pemda dalam pelayanan public	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		Program pelayanan administrasi															
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya :														
				Jasa pelayanan komunikasi	2 rekening	41.9	2 rekening	50	2 rekening	55	2 rekening	60.5	2 rekening	66.55		273.95		
				Jasa pelayanan air	2 rekening		2 rekening		2 rekening		2 rekening		2 rekening					

				Jasa pelayanan listrik	2 rekening		2 rekening		2 rekening		2 rekening		2 rekening					
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan premium	14.040 lt	145.992	15.000 lt	210	16.000 lt	231	17.000 lt	254.1	18.000 lt	279.51		1120.602		
				Terlaksananya Perpanjangan masa berlaku surat kendaraan roda 4	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit					
				Terlaksananya masa berlaku surat kendaraan roda 2	30 unit		30 unit		30 unit		30 unit		30 unit					
			Penyediaan alat tulis kantor			16.8		25		27.5		30.25		33.275		132.825		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya laptop	1 unit	85.032	2 unit	94	3 unit	103.4	4 unit	113.74	5 unit	125.114		521.286		
				Tersedianya PC	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit					
				Tersedianya AC	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit					
				Tersedianya printer	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit					
				Tersedianya TV	1 unit													

			Penyediaan makanan dan minuman	Tersediany a konsumsi rapat staf		40		44		48.4		53.24		58.564		244.204		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			138.704		200		220		242		266.2		1066.904		
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana apartur</b>															
			Pembangunan gedung kantor			25		-		-				-				
			Pengadaan mebeleur			64.1		63		69.3		76.23		83.853		356.483		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			44.927		45		49.5		54.45		59.895		253.772		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			130.844		500		0		0		0		630.844		
	Tertatanya administrasi perkantoran		<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															
			Penyediaan jasa administrasi keuangan			157.014		175		192.5		211.75		232.925		969.189		

	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel		<b>Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>															
	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			101.805		112		123.2		135.52		149.072		621.597		

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan kerja dalam jangka menengah yang dihadapakan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sedangkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkaitan langsung dan relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah kepariwisataan adalah : 1). **Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian Dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama Dan Kearifan Lokal** 2). **mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas,** 3).**mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan pubik berkualitas.**

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menyusun renstra periode yang sama. Dokumen Renstra ini memuat berbagai kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran, pagu indikatif dan lain sebagainya yang dapat dijadikan acuan di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan, kunci utama sukses pembangunan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan isi renstra, sinergitas program dan kegiatan antar SKPD, pemahaman, komitmen, dan tindakan nyata stakeholder dalam akselerasi pembangunan kepariwisataan daerah.